

PENGARUH INVENTORY INTENSITY, KEBIJAKAN UTANG DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Muhammad Rizal Saragih¹, Rusdi², Andri Sjahputra³

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen01465@unpam.ac.id¹, dosen01393@unpam.ac.id², andrisjahputra@yahoo.com

Submitted: 27th March 2023/ **Edited:** 25th June 2023/ **Issued:** 01st July 2023

Cited on: Saragih, M. R., Rusdi, R., & Sjahputra, A. (2023). PENGARUH INVENTORY INTENSITY, KEBIJAKAN UTANG DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 725-735.

ABSTRACT

This study aims to test and provide empirical evidence of the effect of inventory intensity, debt policy and sales growth on tax avoidance in food and beverage subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2021. This type of research is quantitative research and uses secondary data in the form of annual financial reports obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population in this study were 38 companies in the food and beverage subsector that were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2021. The sampling technique used purposive sampling method and obtained as many as 12 sample companies with a period of 6 years so that the data analyzed amounted to 72 data. The analysis technique used is logistic regression with the help of the eviews 12 program. The results show that simultaneously inventory intensity, debt policy, sales growth have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, partially, inventory intensity has a significant effect on tax avoidance, but debt policy and sales growth have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Inventory Intensity, Debt Policy, Sales Growth

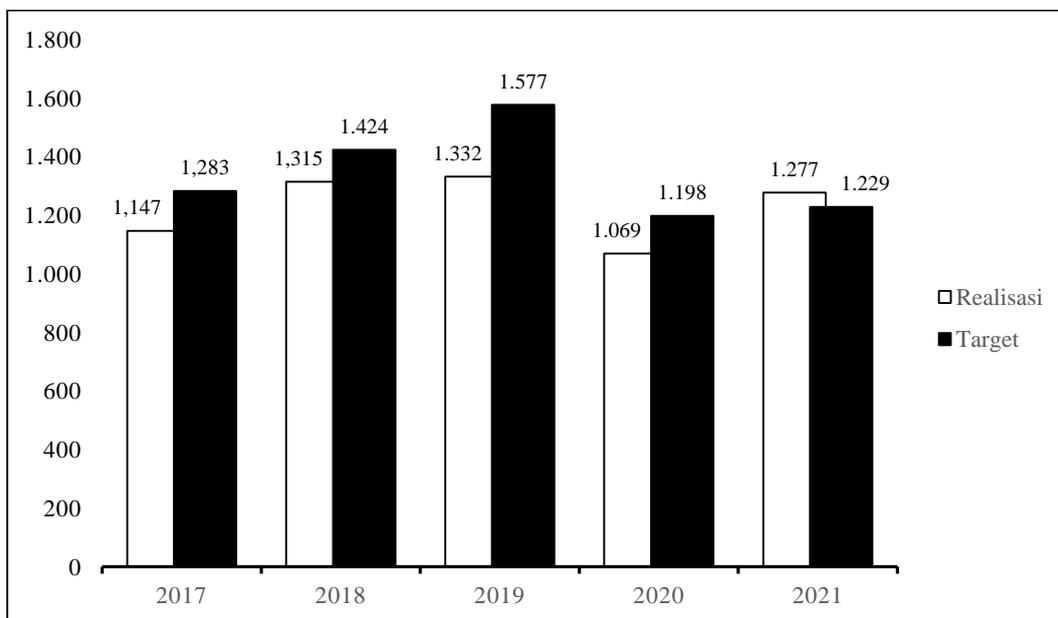
PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan diatur berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halomoan & Sitabuana, 2022). Pajak menjadi kontribusi yang wajib kepada negara karena pajak berperan penting bagi kemajuan suatu negara (Hidayatulloh, 2019).

Pajak sangat penting dalam perekonomian suatu negara, salah satu implikasinya adalah digunakan untuk pembangunan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur, selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan

pemerintah baik itu di bidang sosial maupun ekonomi (Wartoyo, 2019). Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain sebagainya (Mesiono & Lubis, 2021). Pajak yang diterima pemerintah dari wajib pajak badan (perusahaan) merupakan penyumbang utama penerimaan pajak

Pajak merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar, hal ini dibuktikan dengan data pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak nasional yaitu sebesar 1.277,5 triliun rupiah atau sebesar 63,77% dari total pendapatan negara sebesar 2.003,1 triliun rupiah, sisanya sebesar 36,23% berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah (Kemenkeu.go.id, 2021). Berikut grafik realisasi dan target penerimaan pajak 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2021 (dalam triliun rupiah).



Gambar 1. Grafik Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021

Sumber: Data Research, 2022

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak periode tahun 2017 sampai dengan 2021 sangat berfluktuasi. Persentase realisasi penerimaan pendapatan negara pada sektor pajak berasal dari semua jenis pajak pada tahun 2017 sebesar 89,39%, tahun 2018 sebesar 92,34%, tahun 2019 sebesar 84,46%, tahun 2020 sebesar 89,23% dan tahun 2021 sebesar 103,9%. Selama 5 tahun berturut-turut hanya pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak Indonesia melebihi target, namun sebaliknya pada tahun 2017-2020 tidak mencapai target. Belum tercapainya realisasi penerimaan

pajak Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah terdapat tindakan *tax avoidance* dari wajib pajak badan (perusahaan) atau pribadi yang dirancang untuk mengurangi beban pajaknya, ataukah memang dari segi pemerintah belum maksimal melakukan pemungutan pajak (Adnyani & Astika, 2019).

Rasio pajak suatu negara mencerminkan kinerja pemungutan pajak, semakin tinggi rasio pajak maka semakin efisien upaya pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak dan sebaliknya (Dewi & Mahi, 2022). Selain itu faktor lain yang mampu memengaruhi rasio pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak (Bahri, 2020). Di Indonesia tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tercermin dari angka *tax ratio* yang masih rendah (Hartanti & Husein, 2018). Berdasarkan analisis Ekonom Senior, Faisal Basri, menyampaikan bahwa *tax ratio* Indonesia merupakan yang terparah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Secara rinci disampaikan bahwa pada tahun 2013 angka *tax ratio* turun tipis 0,1% dari 11,4% pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2014 *tax ratio* kembali turun 0,4% menjadi 10,9%. Berlanjut ke tahun 2015, *tax ratio* turun 0,2% ke 10,7%. Kemudian pada tahun 2016 turun lagi sebesar 0,3% ke 10,4%, berlanjut di tahun 2017 turun 0,5% menjadi 9,9%. Kemudian, *tax ratio* sempat naik 0,3% ke 10,2% pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 kembali mencatat penurunan 0,4% menjadi 9,8% dan semakin ambles 1,5% menjadi 8,3% pada tahun dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9,11% (Basri, 2021).

Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebagai sampel penelitian yaitu karena industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga terhadap penerimaan pajak negara. Hal ini, dapat tercermin dari hasil kinerjanya dan pergerakan harga sahamnya yang selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga 56,60 triliun rupiah pada tahun 2018 dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17% (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Apabila perusahaan-perusahaan pada subsektor

makanan dan minuman melakukan kegiatan tax avoidance tentu akan memberi dampak pada penerimaan negara dari sektor pajak.

LANDASAN TEORI

Inventory Intensity

Menurut Irama & Dahlena, (2021) usaha manufaktur biasanya mempunyai 5 (lima) jenis persediaan, yaitu sebagai berikut. Biaya perolehan bahan baku (*raw material*) terdiri atas harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi.

Bahan baku masih dapat digolongkan ke dalam bahan baku langsung dan bahan pembantu (Rohayu, et al., 2020). Bahan baku langsung adalah bahan-bahan yang dapat diidentifikasi langsung dalam produk, misalnya bahan kayu untuk pembuatan lemari. Bahan baku pelengkap adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk, seperti minyak pelumas dan kertas amplas. Bahan tersebut secara fisik tidak terlihat dalam produk (Faisal, 2021).

Barang dalam pengolahan (*work in process*) adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian (Waluyo, et al., 2019). Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga dan biaya tidak langsung lainnya.

Barang jadi (*finished goods*) adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual (Verren, 2022). Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Persediaan meliputi barang-barang yang ada dalam perusahaan, dalam perjalanan atau yang dititipkan kepada pihak lain (Mesta & Al Rachmat, 2020). Barang-barang yang tidak dapat lagi dijual atau digunakan untuk produksi tidak digolongkan ke dalam persediaan (Paraswati, et al., 2021). Persediaan semacam ini dimasukkan sebagai bagian aset lain-lain.

Barang dalam perjalanan (*goods in transit*) adalah barang yang dikirimkan atas dasar FOB Shipping Point yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli (Armin, 2019). Apabila tidak diperhitungkan maka persediaan dan utang usaha akan terlalu rendah dicatat dalam neraca serta pembelian dan persediaan akhir akan terlalu rendah dicatat dalam laporan laba rugi (Aris, et al., 2020).

Barang konsinyasi (consigned goods) adalah barang yang telah diserahkan kepada consignee tetapi merupakan kepemilikan dari consignor dan dimasukkan dalam persediaan consignor sebesar harga beli atau biaya produksi (Janrosi, et al., 2021).. Consigned goods akan diungkapkan dalam catatan tersendiri. Consignee harus hati-hati agar tidak memasukkan setiap barang konsinyasi sebagai bagian dari persediaan.

Kebijakan Utang

Kebijakan Utang merupakan strategi perusahaan dalam menentukan besarnya pendanaan utang untuk membiayai kebutuhan perusahaan (Suardana, et al., 2020). Jika perusahaan menetapkan suatu kebijakan bahwa pelunasan utang diambil dari laba ditahan, maka perusahaan harus menahan sebagian dari pendapatan untuk keperluan tersebut yang berakibat pada berkurangnya pendapatan perusahaan yang dapat dibayarkan sebagai deviden (Ratnasari & Purnawati, 2019)

Kebijakan Utang dapat diukur menggunakan proksi Debt to Equity Ratio (DER). Rasio Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas (Fitrianingsih & Budiansyah, 2019). Ratio DER bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajibannya (Ginting, 2018)

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan (Firdaus dan Poerwati (2022)). Pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan penjualan akan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Hal ini terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Sales growth atau pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun, pertumbuhan Penjualan yang tinggi atau stabil dapat berdampak positif terhadap keuntungan perusahaan (Wulandari & Artini, 2019).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan yang penting. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Rohyati & Suropto, 2021). Penghindaran pajak merupakan bagian dari manajemen pajak. Penghindaran pajak bukan merupakan kegiatan yang melanggar hukum, tetapi terlihat seperti sesuatu yang negatif karena perusahaan mencoba untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Perusahaan melakukan praktik tax avoidance melalui loophole dalam aturan pajak yang ada di suatu negara (Monica & Irawati, 2021). Tindakan tax avoidance ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan tidak akan membayarkan beban pajaknya sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat meningkat.

Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Dewi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berjenis asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh maupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menguji serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen yaitu inventory intensity, kebijakan utang dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021 sebanyak 38 perusahaan.

Penelitian ini dibuat dalam jangka waktu dari tahun 2016-2020, dimana Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti agar relevan dengan tujuan penelitian. Populasi subsektor makanan dan minuman pada tahun 2016-2021 sebanyak 38 perusahaan. Dari total populasi tersebut, perusahaan yang telah memenuhi kriteria sampel pada penelitian ini berjumlah 12 perusahaan dengan periode pengamatan selama 6 tahun yaitu tahun 2016-2021, sehingga diperoleh sebanyak 72 sampel data.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 1. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.025286	0.013999	-1.806255	0.0753
Inventory Intensity	0.161992	0.067568	2.397463	0.0193
Kebijakan Utang	-0.003395	0.009258	-0.366762	0.7149
Pertumbuhan Penjualan	0.036931	0.021738	1.698906	0.0939

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individu) diukur dengan menggunakan uji t-statistik dimana menguji pengaruh inventory intensity, kebijakan utang dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Apabila nilai probabilitas signifikan $p < 0,05$, maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

Hipotesis Pertama

Nilai probabilitas dari variabel inventory intensity adalah sebesar 0,0193 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel inventory intensity berpengaruh terhadap variabel tax avoidance pada tingkat signifikansi 5%.

Hipotesis Kedua

Nilai probabilitas dari variabel kebijakan utang adalah sebesar 0,7149 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

variabel kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap variabel tax avoidance pada tingkat signifikansi 5%.

Hipotesis Ketiga

Nilai probabilitas dari variabel pertumbuhan penjualan adalah sebesar 0,0939 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap variabel tax avoidance pada tingkat signifikansi 5%.

Uji Hipotesis Simultan (Uji f)

Tabel 2. Hasil Uji F

R-squared	0.116929	Mean dependent var	-0.000595
Adjusted R-squared	0.077970	S.D. dependent var	0.021140
S.E. of regression	0.020299	Sum squared resid	0.028019
F-statistic	3.001326	Durbin-Watson stat	1.676136
Prob(F-statistic)	0.036454		

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.16 diketahui nilai probability (F-statistic) yaitu sebesar 0,036454, yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini yaitu inventory intensity, kebijakan utang, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap variabel tax avoidance. Hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi tax avoidance atau model sudah layak digunakan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan serta hasil uji yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Variabel inventory intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan nilai probabilitas dari variabel inventory intensity sebesar 0,0193 di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Variabel kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan nilai probabilitas dari variabel kebijakan utang sebesar 0,7149 di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan nilai probabilitas dari variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0,0939 di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Variabel inventory intensity, kebijakan utang dan

pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0364 di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. A., & Astika, I. B. P. (2019). Pengaruh Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(6), 594–621.
- Aris, F., Paweroi, A., & Tamsil, T. (2020). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BERDASARKAN PSAK NO. 14 PADA PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk. *ACCOUNTING JOURNAL*, 1(3), 384-393.
- Armin, K. (2019). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN PADA TOKO ALFAMART SAT BOOM BARU PALEMBANG. *JURNAL KOMPETITIF*, 8(1).
- Bahri, S. (2020). Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1-15.
- Basri, F. (2021). *Mengkhawatirkan, Faisal Basri sebut penurunan tax Ratio Indonesia Paling Parah*. Kontan.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Dewi, N. S., & Mahi, B. R. (2022). Peran penyuluhan pajak terhadap inefisiensi pemungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(2), 212-226.
- Faisal, A. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit NEM.
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018–2020). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 180–189.
- Ginting, S. (2018). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas. Dan Leverage Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 8(2), 195-204.
- Fitrianingsih, D., & Budiansyah, Y. (2019). Pengaruh current rasio dan debt to equity ratio terhadap harga saham di perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013–2017. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Halomoan, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1243-1254.
- Hartanti, E., & Husein, S. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal*

Bisnis Dan Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/Q9ZSEQVAIMJDGRQ8D89CK79JP.pdf>.

- Hidayatulloh, M. H. (2019). Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 102-121.
- Irama, O. N., & Dahlena, M. (2021). Analisis Pengendalian Persediaan Kelapa Sawit Dengan Metode Economic Order Quantity (Studi Kasus Pada PTPN IV Unit Usaha Adolina). *JURNAL AKUNTANSI AUDIT DAN PERPAJAKAN INDONESIA (JAAPI)*, 2(1), 166-177.
- Janros, V. S. E., Khadijah, S. E., & Ak, M. (2021). *Akuntansi keuangan menengah*. CV BATAM PUBLISHER.
- Kemenkeu.go.id. (2021). *Informasi APBN 2021*.
- Mesiono, M., & Lubis, R. R. (2021). Manajemen Finansial Pendidikan di Indonesia (Diskursus Sistem Perpajakan pada Institusi Pendidikan). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 14-27.
- Mesta, E. S., & Al Rachmat, R. (2020). Penilaian Persediaan Barang Dagang Berdasarkan SAK EMKM pada BUMDES Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, 1(3), 1-11.
- Monica, B. A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 385-404.
- Paraswati, S. D., Morasa, J., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Metode Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Pada Pt. Hasjrat Abadi Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Ratnasari, P. S. P., & Purnawati, N. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen. *E-Jurnal Manajemen*, 8(10), 6179-6198.
- Rohayu, S., Fitriyani, I., & Kamaruddin, K. (2020). PENGARUH KETERSEDIAAN BAHAN BAKU KAYU TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PERUSAHAAN MEBEL TEKAD MAJU KELURAHAN BRANG BIJI. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 234-245.
- Rohyati, Y., & Suropto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, And Management Compensation Against Tax Avoidance. *Budapest International Research And Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities And Social Sciences*, 4(2), 2612-2625.
- Suardana, I. K., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2020). Pengaruh profitabilitas, kebijakan utang, kebijakan dividen, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Verren, M. V. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Barang Jadi Pada PT. Sinergi Beton Utama Jakarta. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 933-940.
- Waluyo, E. T. B., Hanafri, M. I., & Sulaeman, S. (2019). Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Pada Gudang Sparepart. *Jurnal Sisfotek Global*, 9(1).

- Wartoyo, W. (2019). SISTEM REGULASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 71-97.
- Wulandari, N. P. I., & Artini, L. G. S. (2019). Pengaruh Likuiditas, Non-Debt Tax Shield, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6), 3560.
- Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36.